

# PENGEMBANGAN WISATA PANTAI MUTUN TERHADAP DAMPAK FISIK, SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT DESA SUKAJAYA LEMPASING, KABUPATEN PESAWARAN, LAMPUNG

Jurnal Pengembangan Kota (2019)

Volume 7 No. 1 (83-90)

Tersedia online di:

<http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpk>

DOI: 10.14710/jpk.7.1.83-90

Tri Adi Wibowo\*, Hari Kaskoyo, Abdullah Aman Damai

Universitas Lampung

**Abstrak.** Pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak ekonomi dan pembangunan bagi masyarakat pesisir. Pantai Mutun merupakan salah satu obyek wisata bahari di Provinsi Lampung yang cukup terkenal dan ramai dikunjungi wisatawan. Desa Sukajaya merupakan desa dengan pemukiman masyarakat yang berjarak tidak jauh dengan kegiatan pariwisata di Pantai Mutun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pengembangan objek wisata Pantai Mutun ditinjau dari sektor perundang-undangan dan pengaruhnya terhadap kehidupan fisik, sosial dan ekonomi masyarakat Desa Sukajaya. Hasil penelitian menunjukkan dampak fisik, sosial, budaya, dan ekonomi yang terjadi akibat perkembangan pariwisata Pantai Mutun yaitu perubahan infrastruktur jalan, peralihan profesi masyarakat, hilangnya rasa percaya masyarakat Desa Sukajaya terhadap pemerintah dan pengelola, hilangnya rasa gotong royong antar masyarakat, peningkatan kesadaran pendidikan keluarga dan bertambahnya peluang kerja masyarakat. Pendapatan rata-rata masyarakat Desa Sukajaya per bulan yaitu Rp 815.000,00 dan peluang kerja masyarakat Desa Sukajaya yaitu sebesar 85%.

**Kata kunci:** dampak pariwisata; Desa Sukajaya; perkembangan pariwisata

**[Title: Effects of Coastal Tourism Development Mutun to the Village Community of Sukajaya Lempasing, Pesawaran, Lampung].** Tourism is a potential sector to be developed as an economy mover and development driver for coastal communities. Mutun Beach is one of the coastal tourism attractions in Lampung Province which is quite well known and crowded with tourists. Sukajaya Village is a village with community settlements located not far from tourism activities in Mutun Beach. This study aims to determine the impact of the development of Mutun Beach tourism object in terms of legislative sector, and its impacts on physical, social and economic life of Sukajaya Village community. The result showed the physical, social, cultural and economic impacts that occurred due to the development of Mutun beach tourism, namely changes in road infrastructure, professional transition, loss of trust in Sukajaya Village communities towards the government and management, loss of mutual cooperation among communities, increased awareness of family education and increasing job opportunities. The average income of Sukajaya Village community per month is Rp. 815,000.00 and job opportunity is 85%.

**Keywords:** *development of tourism; Sukajaya Village; the impact of tourism*

*Cara mengutip:* Wibowo, T. A., Kaskoyo, H., & Damai, A. A. (2019). Efek Pengembangan Wisata Pantai Mutun Terhadap Masyarakat Desa Sukajaya Lempasing, Pesawaran, Lampung. **Jurnal Pengembangan Kota**. Vol 7 (1): 83-90. DOI: 10.14710/jpk.7.1.83-90

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar yang wilayahnya terbentang dari Sabang hingga Merauke atau dari Talaud hingga Rote. Indonesia diakui sebagai salah satu negeri yang elok dengan berbagai keindahan alamnya, tidak hanya di darat, juga di laut (Djou, 2013). Wilayah pesisir memiliki potensi lain berupa keunikan dan keindahan alam yang dapat menjadi daya tarik

wisata sehingga aktivitas pariwisata pun dapat dikembangkan dan menghasilkan dampak positif

ISSN 2337-7062 (Print), 2503-0361 (Online) © 2019

This is an open access article under the CC-BY-NC-ND license (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>). – lihat halaman depan © 2019

\*Email: [triadi\\_wibowo@yahoo.com](mailto:triadi_wibowo@yahoo.com)

Diterima 8 Mei 2019, disetujui 24 Juli 2019

dengan ikut meningkatkan perekonomian kawasan (Wakhidah, Dewi, & Ristianti, 2013). Salah satu pembangunan yang potensial untuk dikembangkan dari daerah pesisir dan laut adalah pariwisata bahari, karena industri pariwisata adalah salah satu sumber penting penghasil devisa yang mendukung pertumbuhan ekonomi (Andriyani & Husnita, 2012). Pengembangan sektor pariwisata pesisir yang ada diharapkan selain dapat meningkatkan sektor pendapatan daerah hingga bermanfaat bagi masyarakat yang ada di sekitar lokasi wisata, juga diharapkan menjadi *landmark* ikon suatu daerah.

Pariwisata relatif tidak terpengaruh terhadap kondisi perekonomian dunia yang tidak stabil (Santi, Hero, & Arifin, 2017). Pengembangan sektor pariwisata dapat membuka peluang dan kesempatan bekerja bagi masyarakat, baik formal maupun informal. Oleh karena itu, sektor pariwisata sangat besar potensinya untuk dijadikan komoditi utama sebuah negara (World Tourism Organization, 2001). Masyarakat dapat berkontribusi melakukan aktivitas dengan tujuan menaikkan taraf hidupnya melalui kegiatan perekonomian seperti berdagang souvenir, makanan *khas*, hingga menyewakan peralatan pendukung kegiatan wisata selama pengunjung berkunjung ke sana. Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki pesisir dan dapat dikelola secara baik adalah wilayah Pesawaran, yang terletak di Provinsi Lampung.

Kabupaten Pesawaran merupakan sebuah kabupaten daerah otonomi baru di Provinsi Lampung, yang merupakan daerah pemekaran Kabupaten Lampung Selatan. Kabupaten ini tergolong daerah yang strategis, terutama dilihat dari aspek potensi wisata yang dimilikinya, salah satunya seperti destinasi wisata pantai. Provinsi Lampung kaya akan objek wisata pantai dan laut yang eksotis, terutama di sekitar Teluk Lampung. Lokasi pantai yang umumnya terletak tidak terlalu jauh dari pusat kota Bandar Lampung. Salah satu lokasi pantai tujuan wisata yang cukup diminati di pesisir Kabupaten Pesawaran dan lokasinya relatif mudah dijangkau yaitu Pantai Mutun.

Secara administratif, Pantai Mutun masuk dalam wilayah Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, tepatnya di Desa Sukajaya Lempasing. Saat ini Pantai Mutun menjadi salah satu daerah

tujuan wisata bahari yang banyak diminati oleh wisatawan nusantara baik yang berasal dari Provinsi Lampung maupun dari berbagai wilayah provinsi lain yang ada di Indonesia terutama yang berada di sekitarnya seperti Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten (Abdillah, 2016). Potensi wisata yang menjadi daya tarik di pantai ini adalah pantainya yang bersih dengan pasirnya yang putih dan ombaknya yang tidak besar sehingga cocok untuk aktivitas wisata berenang dan *snorkling*. Di Pantai Mutun tersedia berbagai fasilitas wisata pantai lainnya berupa wahana seperti *parasailing*, *flying fish*, *banana boat*, *donut*, *kano*, *jetski*, *snorkeling*, dan *glass bottom boat*. Untuk anak-anak juga disediakan penyewaan ban pelampung untuk berenang dan bermain air laut di pantai.

Pantai Mutun memiliki potensi untuk dikembangkan karena memiliki keunikan karakteristik pantai yang berbeda terutama ditinjau dari jarak antara pantai dengan Kota Bandar Lampung yang hanya 30 menit, kondisi perairan yang jernih, ombak yang tidak terlalu besar menjadi nilai implisit dan karakter tersendiri bagi wisatawan. Pengelolaan aspek pendukung kepariwisataan dengan baik, seperti sarana dan fasilitas pendukung yang ada di sekitar kawasan Pantai Mutun, dapat menciptakan peluang dalam peningkatan daya tarik, sehingga dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung kembali. Hal ini disebabkan karena pantai mempunyai kesan indah tersendiri yang mana orang takkan pernah puas untuk melihat dan menikmati keindahannya (Andriyani & Husnita, 2012).

Pengembangan objek pariwisata Pantai Mutun menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Hal ini dikarenakan Pengembangan pariwisata merupakan upaya yang sangat kompleks yang perlu melibatkan semua *stakeholders* (Kuhaja, 2014). Hal ini dikarenakan bahwa pariwisata pesisir adalah bentuk pariwisata yang paling cepat berkembang. Pentingnya ekonomi pariwisata pesisir tidak dapat disangkal. Ini merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi banyak negara dan wilayah. Hal ini mengakibatkan terciptanya dampak sosial-budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan di banyak wilayah pesisir, yang khususnya rentan terhadap tekanan

yang terkait dengan pertumbuhannya (Lakshmi & Shaji, 2016).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak pengembangan objek wisata Pantai Mutun terhadap kehidupan fisik, sosial dan ekonomi pada masyarakat Desa Sukajaya sehingga kesejahteraannya dapat diwujudkan. Sasaran penelitian ini adalah teridentifikasinya kondisi masyarakat Desa Sukajaya akibat adanya pengembangan sektor wisata di Pantai Mutun, sehingga dapat dianalisis upaya-upaya yang harus dilakukan untuk perkembangan wisata di kawasan ini. Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada analisis dampak pengembangan obyek wisata Pantai Mutun terhadap kehidupan fisik, sosial, dan ekonomi yang terjadi antara masyarakat dan pihak pengelola.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian telah dilaksanakan Di Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Penelitian Dilaksanakan pada bulan November-Desember 2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara langsung menggunakan kuesioner yang berisis pertanyaan mengenai karakteristik dan persepsi masyarakat Desa Sukajaya mengenai dampak pengembangan pariwisata Pantai Mutun terhadap dimensi fisik, sosial dan ekonomi serta konflik yang terjadi antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat Desa Sukajaya. Data Sekunder diperoleh dari profil Desa Sukajaya.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan struktur penelitian, dimana pengambilan sampel responden yang dipilih oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik dan karakteristik tertentu (Djarwanto & Subagyo, 1996). Responden yang diwawancarai menggunakan kuesioner dalam penelitian ini yaitu masyarakat Desa Sukajaya secara random sejumlah 100 responden.

Penelitian ini terfokus pada dampak yang ditimbulkan akibat adanya pengembangan Pantai

Mutun di Desa Sukajaya. Dampak yang diamati berupa keadaan fisik, sosial, budaya, dan ekonomi. Dalam penelitian ini dihitung juga rata-rata pendapatan masyarakat dan persentase serapan tenaga kerja masyarakat dalam bidang pariwisata (Richardson, 1985).

$$\text{Tingkat Pendapatan Rata-rata} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Jumlah Responden}}$$

Untuk kesempatan kerja, teknik yang digunakan yaitu *the employment and population multiplier model* digunakan untuk memprediksi jumlah *employment* (tenaga kerja) pada suatu kawasan. Teknik ini untuk mengetahui rasio antara *service jobs* ekonomi di dalam kawasan industri pariwisata ( $E_s$ ) yaitu lapangan pekerjaan di industri pariwisata terhadap jumlah penduduk usia produktif ( $P$ ):

$$\beta = \frac{E_s}{P}$$

Dimana:

$\beta$  = ratio jumlah industri pariwisata dan jumlah penduduk usia produktif

$E_s$  = *service jobs sector basis* di wilayah penelitian (jumlah lapangan kerja di industri pariwisata)

Kemudian dihitung proporsi pekerja yang terdapat di dalam kawasan terhadap jumlah penduduk yaitu

$$y = \frac{P}{E}$$

Dimana:

$Y$  = proporsi pekerja terhadap jumlah penduduk produktif

$E$  = jumlah pekerja di industri pariwisata

Setelah dilakukan perhitungan proporsi pekerja terhadap jumlah penduduk produktif maka akan dapat diperkirakan jumlah penduduk setempat yang dapat bekerja di dalam industri pariwisata. Perkiraan jumlah penduduk yang dapat bekerja dapat dihitung menggunakan metode:

$$E = \frac{E_p}{1 - \beta y}$$

Dimana:

$E_p$  = jumlah penduduk yang bekerja pada industri pariwisata yang terdapat pada kawasan penelitian.

Dari perhitungan tersebut, maka dapat dihitung persentase peluang kerja penduduk setempat terhadap tenaga kerja yang ada saat ini yaitu:

Peluang kerja penduduk setempat:

$$y = \frac{EP}{E} \times 100\%$$

Kemudian perhitungan peluang kerja penduduk setempat dikategorikan dalam dua kategori yaitu:

1. < 50 % maka kesempatan kerja penduduk wilayah penelitian mempunyai nilai yang rendah
2. > 50 % maka kesempatan kerja penduduk wilayah penelitian mempunyai nilai yang tinggi.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sukajaya menunjukkan sebagian besar masyarakat yang ditemui berumur 31-35 tahun. Pendapatan masyarakat Desa Sukajaya sebagian besar yaitu Rp 600.000-1.000.000 yang bekerja sebagai ojek perahu serta pedagang dengan masing-masing frekuensi 17 orang. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata memiliki efek positif terhadap pendapatan masyarakat. Hal ini juga dikemukakan (Harianik, Suswandi, & Diartho, 2016) yang menyatakan bahwa mayoritas pekerjaan masyarakat setelah adanya pengembangan pariwisata yaitu pedagang, penyedia jasa penginapan, dan rumah makan atau warung. Hal tersebut terjadi akibat adanya penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata. Dengan adanya penyerapan tenaga kerja, maka tingkat pengangguran masyarakat Desa Sukajaya di usia produktif dapat diminimalisir. Aktivitas wisata dengan sektor informal dapat menjangkau masyarakat dengan kemampuan modal terbatas, dan keterampilan terbatas (Suardana & Dewi, 2015).

Hasil penelitian menunjukkan persepsi masyarakat Desa Sukajaya tentang sarana dan prasarana setelah adanya pengelolaan obyek wisata Pantai Mutun. Masyarakat Desa Sukajaya sebagian besar menjawab cukup baik dengan persentase 60%, 20% menjawab baik, dan 20% menjawab tidak

baik. Sarana dan prasarana yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu tentang kondisi jalan, penerangan dan fasilitas umum seperti rumah ibadah. Dengan tersedianya fasilitas umum tersebut, masyarakat mendapat manfaat lebih akibat adanya perkembangan sektor pariwisata di Pantai Mutun. Dalam hal ini sektor pariwisata telah memberikan kontribusi untuk pembangunan sarana pendukung di banyak negara berkembang (Brohman, 1995).

Masyarakat Desa Sukajaya menyatakan bahwa adanya obyek wisata Pantai Mutun memberikan manfaat bagi keadaan fisik, sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat yaitu dengan persentase 66%. Namun, dari persentase tersebut, masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi wisata sebagai pedagang, ojek perahu, penyewaan ban dibebankan dengan potongan penghasilan yang disebut uang retribusi atau biasa disebut masyarakat sebagai *uang salar* yang cukup tinggi dan selalu berubah-ubah sesuai dengan jumlah pengunjung yang datang ke Pantai Mutun. Oleh karena itu, terjadi ketidakpastian pendapatan masyarakat perbulannya.

Kawasan pengembangan Pantai Mutun tidak ubahnya dengan pantai-pantai lain yang menyatu dengan kawasan pemukiman warga, namun terdapat pemandangan yang janggal, yaitu adanya bangunan seperti pagar yang membatasi lokasi pengembangan Pantai Mutun dengan pemukiman masyarakat hingga pagar tersebut menjorok ke bibir pantai (lihat Gambar 1) melebihi aturan yang semestinya yaitu 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bahwa dalam Pasal 1 point 21 menyatakan bahwa kawasan perlindungan sempadan pantai meliputi daratan sepanjang pantai yang panjangnya proporsional dengan bentuk dan kondisi pantai, lebar garis sempadan ini adalah 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Ditambahkan oleh Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, pada Pasal 4 disebutkan bahwa penetapan batas sempadan

pantai dilakukan dengan tujuan salah satunya untuk melindungi dan menjaga alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai.

Pengembang wisata Pantai Mutun seharusnya dapat mencontoh beberapa lokasi pariwisata pesisir yang penataannya lebih baik dikarenakan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu tidak membangun apapun di wilayah sempadan pantai. Contoh yang dapat ditemukan terkait penataan yang baik seperti pada pantai dan wisata pesisir di Pulau Bali. Keberhasilan Bali dalam menarik wisatawan untuk berkunjung telah banyak memberi manfaat kepada masyarakat, melalui penciptaan lapangan kerja, mendorong ekspor hasil-hasil industri kerajinan serta sebagai sumber devisa daerah bahkan dalam beberapa dasawarsa sektor pariwisata telah mampu menjadi generator penggerak (*leading sector*) perekonomian daerah Bali (Pitana, 1999).



**Gambar 1.** Pagar yang Dibangun oleh Pengembang Wisata Pantai Mutun

Pelaksanaan pengelolaan sumberdaya, pemerintah berperan sebagai agen pembangunan. Undang-Undang nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 23 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas. Fakta yang ada di lapangan yaitu pemerintah kurang memberikan perhatian atas terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pengembang Pantai Mutun seperti pembatasan akses dengan cara dipagar hingga mencapai pesisir. Perundang-undangan telah mengatur bahwa wilayah pesisir dan pantai tidak boleh

dimiliki secara pribadi dan wajib memberikan akses terhadap publik untuk dapat menikmati panorama pesisir.

Pengelolaan Pantai Mutun juga menimbulkan konflik antara masyarakat dan pengelola. Hal tersebut terjadi karena adanya saling klaim terkait pemberdayaan lahan pesisir. Konflik yang terjadi pada masyarakat Desa Sukajaya dan pengelola adalah mengenai manfaat pengelolaan wilayah pariwisata pesisir Pantai Mutun yang dijadikan sebagai lokasi berdagang dan pondokan (*cottage*). Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Sukajaya khususnya masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan wilayah pariwisata mengungkapkan bahwa mereka sangat sedikit sekali menerima manfaat dari pengelolaan pariwisata di Pantai Mutun. Hal tersebut disebabkan karena pengelola mengambil alih semua fasilitas pendukung pariwisata seperti pondokan dan izin berdagang. Banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidup pada wilayah pesisir yang saat ini telah dijadikan area pariwisata, namun masyarakat itu sendiri kesulitan dalam mencari lahan untuk berdagang dan menawarkan jasa seperti ojeg perahu, penyewaan ban, dan lain-lain. Hal tersebut akibat dari status kepemilikan lahan oleh pengelola Pantai Mutun yang membatasi izin berdagang di dalam lokasi pariwisata.

Permasalahan yang terjadi diatas seharusnya tidak perlu ada jika pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan pariwisata melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat dan pihak pengelola sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan wilayah pesisir. Pemerintah dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait kepemilikan lahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, Pasal 2 menjelaskan tentang larangan untuk menggunakan tanah atau muka bumi bagi setiap orang yang tidak memiliki ijin yang sah dari penguasa tanah tersebut.

Namun dalam hal ini, pengelola juga harus memiliki pertimbangan dan pengetahuan hukum untuk mengikutsertakan masyarakat dalam pengembangan sektor pariwisata sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dimana pada Pasal 5 disebutkan bahwa penyelenggaraan pariwisata dilaksanakan dengan prinsip memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas serta memberdayakan masyarakat setempat. Pemerintah sebagai salah satu *stakeholder* pariwisata diharapkan untuk lebih meningkatkan peranannya terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pembinaan teknis tentang pengelolaan obyek wisata dan pembinaan terhadap usaha-usaha kerajinan yang dilakukan masyarakat setempat.

Dampak fisik yang dirasakan masyarakat Desa Sukajaya lebih kepada kualitas dan kuantitas infrastruktur desa. Masyarakat Desa Sukajaya menyatakan bahwa dengan adanya pengelolaan Pantai Mutun memberikan perubahan terhadap kualitas infrastruktur terutama jalan. Hal tersebut secara tidak langsung memberikan pengaruh kepada aktivitas masyarakat yaitu memudahkan dalam bekerja dan berpergian. Selain jalan, pembangunan juga dilakukan dalam upaya penyediaan rumah ibadah yang didanai oleh pihak pengembang. Dengan adanya pengembangan pariwisata di Pantai Mutun tersebut sesuai dengan pernyataan Dahuri, Rais, Ginting, dan Sitepu (2001), bahwa jika suatu wilayah pesisir dibangun untuk tempat rekreasi, biasanya fasilitas-fasilitas pendukung lainnya akan berkembang pesat.

Perkembangan pariwisata Pantai Mutun memberikan dampak tersendiri bagi kehidupan sosial-budaya masyarakat sekitar. Menurut Wiranatha (2008), perkembangan pariwisata memberikan dampak positif dan negatif kepada daerah dan masyarakat dimana pariwisata itu dikelola. Dalam hal ini terdapat beberapa perubahan sosial-budaya yang terjadi pada masyarakat Desa Sukajaya yaitu:

1. Peralihan profesi masyarakat Desa Sukajaya sejumlah 68%.

2. Hilangnya kepercayaan masyarakat Desa Sukajaya kepada pengelola dan pemerintah sebesar 70%.
3. Ketergantungan masyarakat terhadap sektor pariwisata 70%.
4. Hilangnya rasa gotong royong masyarakat Desa Sukajaya sebesar 50%.
5. Meningkatnya kesadaran masyarakat Desa Sukajaya akan pentingnya pendidikan bagi anak dan keluarga 58%.

Keberadaan Pantai Mutun dengan sendirinya memberikan dampak terhadap ekonomi masyarakat sekitar. Masyarakat menyatakan dengan adanya perkembangan Pantai Mutun memberikan manfaat bagi mereka sehingga dapat menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagian masyarakat bekerja sebagai pedagang dan ojeg perahu di sekitar area pariwisata serta memiliki pendapatan rata-rata yaitu sekitar Rp 815.000/orang/bulan. Namun dengan nilai pendapatan tersebut terbilang kecil dan belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang semakin meningkat jika dibandingkan dengan UMK Kabupaten Pesawaran yang sebesar Rp 2.074.673.

Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat akan potensi pengembangan produk dan jasa wisata menjadi salah satu penyebab perputaran uang yang tidak stabil. Masyarakat seharusnya mampu mengembangkan produk baik makanan atau *souvenir* khas Desa Sukajaya, namun kenyataannya hanya terdapat satu tempat makan milik masyarakat Desa Sukajaya di sekitar Pantai Mutun dan toko *souvenir* khas Desa Sukajaya. Toko *souvenir* tersebut menjual barang-barang yang sudah biasa ditemukan di lokasi pariwisata bahari lainnya yaitu seperti tirai dan hiasan dinding yang terbuat dari kerang.

Jika dilihat dari kesempatan kerja masyarakat Desa Sukajaya sangat besar yaitu 85%. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesempatan kerja masyarakat Desa Sukajaya sangat tinggi di bidang pariwisata. Terlihat dari pekerjaan sebagian masyarakat sebagai ojeg perahu dan pedagang dengan masing-masing sebanyak 17 orang sedangkan masyarakat lainnya bekerja sebagai nelayan, buruh harian lepas, buruh tani, petani, karyawan swasta, buruh bangunan dan pegawai

negeri sipil (PNS). Pelibatan masyarakat dalam sebuah pengembangan dan pengelolaan pariwisata akan memberikan dampak tersendiri bagi masyarakat sekitar. Menurut Warpani (2007), pengembangan pariwisata dapat membuka peluang kerja yang sangat luas bagi masyarakat baik formal atau non formal.

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan akibat adanya pengembangan potensi kawasan Pantai Mutun sebagai suatu kawasan wisata terkait dampaknya secara fisik, sosial dan ekonomi yaitu; (1) Perubahan terkait dampak fisik adanya wisata Pantai Mutun adalah perubahan kualitas infrastruktur jalan yang dirasakan masyarakat Desa Sukajaya, terutama akses jalan dan sarana prasarana rumah ibadah; (2) Dampak sosial yang terjadi yaitu adanya peralihan profesi masyarakat di Desa Sukajaya akibat pengembangan pariwisata Pantai Mutun; hilangnya kepercayaan masyarakat Desa Sukajaya terhadap pihak pengelola dan pemerintah; ketergantungan masyarakat terhadap sektor pariwisata Pantai Mutun; hilangnya kebiasaan gotong royong akibat kesibukan masyarakat yang bekerja di sektor pariwisata; dan adanya peningkatan akan kesadaran pendidikan di keluarga akibat masuknya pariwisata sebagai budaya baru; (3) Dampak ekonomi dari segi pengembangan wisata Pantai mutun bagi masyarakat Desa Sukajaya yaitu terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat seperti menjadi pedagang makanan dan minuman, souvenir serta ojeg perahu dengan pendapatan rata-rata Rp. 815.000/orang/bulan; kesempatan bekerja masyarakat sejumlah 85%; peralihan profesi masyarakat Desa Sukajaya sejumlah 68%; dan ketergantungan masyarakat terhadap sektor pariwisata 70%; (4) Pemerintah sebagai regulator dalam hal ini belum secara maksimal dalam menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan pariwisata melalui penerbitan peraturan-peraturan, memberikan acuan dasar kepada masyarakat dan pihak pengelola sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan wilayah pesisir. Sehingga tidak terjadi konflik antara pengembang wisata dan masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, D. (2016). Pengembangan Wisata Bahari di Pesisir Pantai Teluk Lampung. *Jurnal Destinasi Kepariwisata Indonesia Vol, 1(1)*, 45-66. Retrieved from [https://www.academia.edu/33124736/PE\\_NGEMBANGAN\\_WISATA\\_BAHARI\\_DI\\_PESI\\_SIR\\_PANTAI\\_TELUK\\_LAMPUNG\\_Marine\\_Tourism\\_Development\\_In\\_Lampung\\_Coastal\\_Bay](https://www.academia.edu/33124736/PE_NGEMBANGAN_WISATA_BAHARI_DI_PESI_SIR_PANTAI_TELUK_LAMPUNG_Marine_Tourism_Development_In_Lampung_Coastal_Bay)
- Andriyani, I., & Husnita, L. (2012). Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Pengembangan Wisata Bahari Di Kepulauan Sikakap, Kabupaten Mentawai. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, 1(2)*, 95-101. Retrieved from <http://ejournal.stkip-pgrisumbar.ac.id/index.php/jurnal-mamangan/article/view/1355>
- Brohman, J. (1995). Economism and Critical Silences in Development Studies: A Theoretical Critique of Neoliberalism. *Third World Quarterly, 16(2)*, 297-318. doi:10.1080/01436599550036149
- Dahuri, R., Rais, J., Ginting, S. P., & Sitepu, D. M. (2001). *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu (Vol. 328)*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Djarwanto, P. S., & Subagyo, P. (1996). *Statistik Induktif Edisi Keempat*. Yogyakarta: BPFE.
- Djou, J. A. G. (2013). Pengembangan 24 Destinasi Wisata Bahari Kabupaten Ende. *Jurnal Kawistara, 3(1)*, 1-116. doi:10.22146/kawistara.3958
- Harianik, N., Suswandi, P. E., & Diartho, H. C. (2016). Dampak Objek Wisata Pulau Merah Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*. Retrieved from [https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/75282/NURUL%20HARIA\\_NIK.pdf?sequence=1](https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/75282/NURUL%20HARIA_NIK.pdf?sequence=1)
- Kuhaja, T. (2014). Kajian Kelembagaan dalam Pengembangan Pariwisata Pantai yang Berkelanjutan. *JURNAL PEMBANGUNAN WILAYAH & KOTA, 10(3)*, 278-292. doi:10.14710/pwk.v10i3.7785

- Lakshmi, S. R., & Shaji, T. L. (2016). Transformation of Coastal Settlements Due to Tourism. *Procedia Technology*, 24, 1668-1680. Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/81129234.pdf>
- Pitana, I. G. (1999). *Pelangi Pariwisata Bali*. Diakses dari Denpasar:
- Richardson, H. W. (1985). Input-Output and Economic Base Multipliers: Looking Backward and Forward. *Journal of Regional Science*, 25(4), 607-661. doi:10.1111/j.1467-9787.1985.tb00325.x
- Santi, N. M., Hero, Y., & Arifin, H. S. (2017). Kontribusi Wisata Bahari Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Pulau Nusa Penida, Klungkung. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 7(2), 81-98. doi:10.24843/JKB.2017.v07.i02.p05
- Suardana, I. W., & Dewi, N. G. A. S. (2015). Dampak Pariwisata Terhadap Mata Pencaharian Masyarakat Pesisir Karangasem: Pendekatan Pro Poor Tourism. *PIRAMIDA*, 11(2). Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/piramida/article/view/23281/15302>
- Wakhidah, K., Dewi, S. P., & Ristianti, N. S. (2013). Bentuk Pengembangan Pariwisata Pesisir Berkelanjutan di Kabupaten Pekalongan. *Ruang*, 1(2), 261-270. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/ruang/article/view/5316>
- Warpani, S. P. (2007). *Pariwisata dalam Tata Ruang Wilayah*. Bandung: Penerbit ITB.
- Wiranatha. (2008). *Pengelolaan Objek Wisata Berbasis Masyarakat (Debat Publik)*. Diakses dari Denpasar:
- World Tourism Organization. (2001). *Global Forecasts and Profiles of Market Segments*. Europe: UNWTO Publications.